



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLÁH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
 11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKG adalah Rekening Kas Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
 12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara Republik Indonesia.
 13. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut dengan BLT Gampong adalah pemberiann uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pemdemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lapiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dalam Pasal 16 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dalam Pasal 17 ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).



- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, dan Pasal 11F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong;
 - 2. Qanun gampong tentang APBG; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3. laporan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut: 
- 

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong;
 2. Qanun gampong tentang APBG; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah menjadi aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal gampong belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut: 
- 

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (2) Dalam hal gampong telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritas untuk BLT Gampong; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b. bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong





- (3) Dalam hal gampong telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 - b. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKG secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11A ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Gampong, kekurangan pembayaran BLT Gampong dapat menggunakan Dana Desa Tahap berikutnya.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dengan tambahan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - 2. bulan kedua sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15 % lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua sebesar 15 % lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Gampong, Pemerintah Gampong dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

Pasal 11D

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Qanun gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 - b. Tahap II berupa: 
- 

1. laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 3. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementean Dalam Negeri.

Pasal 11E

- (1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;

2. bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong;
- (3) Dalam hal gampong telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong;



- (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKG secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11A ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Gampong, kekurangan pembayar BLT Gampong dapat menggunakan Dana Desa Tahap berikutnya

Pasal 11F

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritas untuk BLT Gampong.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing;

- a) bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Gampong, Pemerintah Gampong dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-9)* antara lain:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-9)*; dan/atau
 - b. jaringan pengaman sosial di gampong.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
- 

9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaringan pengaman sosial di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Gampong untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBG paling banyak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Gampong bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Keuchik dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanung Gampong mengenai APBG.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

12. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Dalam hal pemerintah gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Gampong yang berstatus sebagai Gampong Mandiri tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18B

Ketentuan mengenai:

- a. perhitungan pembagian Dana Desa untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11B ayat (1) dan ayat (2);
 - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b angka 2, dan Pasal 11D ayat (1) huruf b angka 2.
 - d. format lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa;
 - e. format laporan pelaksanaan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

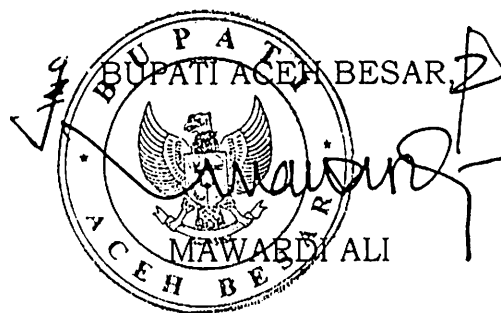
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 12 Mei 2020 M

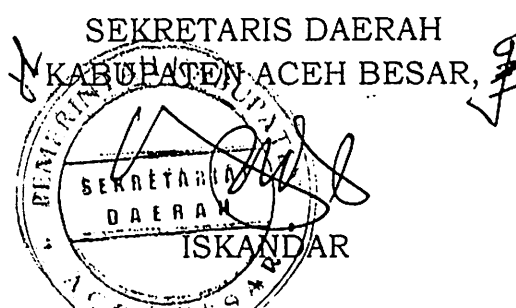
19 Ramadhan 1441 H



Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 12 Mei 2020 M

19 Ramadhan 1441 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 11

Pasal 18B

Ketentuan mengenai:

- a. perhitungan pembagian Dana Desa untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11B ayat (1) dan ayat (2);
 - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b angka 2, dan Pasal 11D ayat (1) huruf b angka 2.
 - d. format lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa;
 - e. format laporan pelaksanaan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 12 Mei 2020 M

19 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 12 Mei 2020 M

19 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP
 GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
 ANGGARAN 2020

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
1	Lhoong	1 Meunasah Krueng Kala	719,604,000	708,797,000
		2 Jantang	712,408,000	701,601,000
		3 Baroh Krueng Kala	714,845,000	704,038,000
		4 Tunong Krueng Kala	776,366,000	765,559,000
		5 Seungko Mulat	744,415,000	733,608,000
		6 Birek	699,342,000	688,535,000
		7 Kareung	688,473,000	677,666,000
		8 Paroy	724,803,000	713,996,000
		9 Teungoh Blang Mee	687,233,000	676,426,000
		10 Lamkuta Blang Mee	696,410,000	685,603,000
		11 Baroh Blang Mee	697,647,000	686,840,000
		12 Umong Sribee	823,924,000	813,117,000
		13 Teungoh Geunteut	728,372,000	717,565,000
		14 Baroh Geunteut	711,604,000	700,797,000
		15 Lamjuhang	752,059,000	741,252,000
		16 Utamong	698,081,000	687,274,000
		17 Gapuy	707,698,000	696,891,000
		18 Lamsujen	746,455,000	735,648,000
		19 Mon Mata	709,564,000	698,757,000
		20 Lamgeuriheu	720,314,000	709,507,000
		21 Keutapang	702,686,000	691,879,000
		22 Saney	701,912,000	691,105,000
		23 Cundien	726,477,000	715,670,000
		24 Glee Bruek	748,476,000	737,669,000
		25 Pasi	715,024,000	704,217,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		26 Pudeng	770,736,000	759,929,000
		27 Cot	742,178,000	731,371,000
		28 Meunasah Lhok	713,674,000	702,867,000
2	Lhoknga	29 Mon Ikeun	720,689,000	709,882,000
		30 Weu Raya	695,467,000	684,660,000
		31 Lam Kruet	704,867,000	694,060,000
		32 Lampaya	754,854,000	744,047,000
		33 Nusa	696,433,000	685,626,000
		34 Lamgabqh	731,250,000	720,443,000
		35 Lambaro Kueh	711,849,000	701,042,000
		36 Lam Ateuk	859,216,000	848,409,000
		37 Kueh	707,350,000	696,543,000
		38 Tanjong	708,586,000	697,779,000
		39 Aneuk Paya	715,710,000	704,903,000
		40 Seubun Keutapang	692,249,000	681,442,000
		41 Seubun Ayon	690,804,000	679,997,000
		42 Lambaro Seubun	693,676,000	682,869,000
		43 Naga Uambang	692,768,000	681,961,000
		44 Lamcok	704,337,000	693,530,000
		45 Meunasah Mesjid LamIhom	685,664,000	674,857,000
		46 Meunasah Mon Cut	691,993,000	681,186,000
		47 Meunasah Manyang	689,600,000	678,793,000
		48 Lamgirek	694,824,000	684,017,000
		49 Meunasah Baro	691,561,000	680,754,000
		50 Meunasah Beutong	706,144,000	695,337,000
		51 Meunasah Karieng	694,102,000	683,295,000
		52 Meunasah Balee	704,720,000	693,913,000
		53 Meunasah Lambaro	692,738,000	681,931,000
		54 Meunasah Mesjid Lampuuk	684,412,000	673,605,000
		55 Meunasah Blang	691,398,000	680,591,000
		56 Meunasah Cut	686,154,000	675,347,000
3	Indrapuri	57 Reukih Dayah	734,280,000	723,473,000
		58 Reukih Keupula	689,172,000	678,365,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		59 Lam Ili Mesjid	702,831,000	692,024,000
		60 Lam Ili Teungoh	754,767,000	743,960,000
		61 Lam Ili Ganto	697,735,000	686,928,000
		62 Meunara	719,859,000	709,052,000
		63 Aneuk Glee	805,657,000	794,850,000
		64 Krueng Lamkareung	733,603,000	722,796,000
		65 Sinyeu	728,345,000	717,538,000
		66 Seureumo	730,861,000	720,054,000
		67 Ulee Karung	689,284,000	678,477,000
		68 Lambeutong	709,783,000	698,976,000
		69 Lampupok Baro	692,492,000	681,685,000
		70 Lampupok Raya	694,022,000	683,215,000
		71 Seulangai	701,288,000	690,481,000
		72 Riting	726,443,000	715,636,000
		73 Sihom Lhok	721,158,000	710,351,000
		74 Sihom Cot	705,206,000	694,399,000
		75 Seuot Baroh	723,697,000	712,890,000
		76 Seuot Tunong	711,366,000	700,559,000
		77 Lampanah Ranjo	689,445,000	678,638,000
		78 Lampanah Teungoh	694,435,000	683,628,000
		79 Lampanah Dayah	701,491,000	690,684,000
		80 Lampanah Baro	715,228,000	704,421,000
		81 Lampanah Tunong	761,847,000	751,040,000
		82 Indrapuri	685,712,000	674,905,000
		83 Lam Lubuk	834,713,000	823,906,000
		84 Empee Ara	690,275,000	679,468,000
		85 Limo Blang	744,655,000	733,848,000
		86 Limo Mesjid	739,949,000	729,142,000
		87 Limo Lamleuweung	695,576,000	684,769,000
		88 Lheu	702,172,000	691,365,000
		89 Meusale Lhok	721,417,000	710,610,000
		90 Cureh	699,265,000	688,458,000
		91 Cot Kareung	735,707,000	724,900,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		92 Lamlueng	696,938,000	686,131,000
		93 Mureu Ulee Titi	767,230,000	756,423,000
		94 Mureu Bueng Ue	768,082,000	757,275,000
		95 Mureu Baro	728,665,000	717,858,000
		96 Mureu Lam Glumpang	722,453,000	711,646,000
		97 Pasar Indrapuri	686,096,000	675,289,000
		98 Manggra	722,594,000	711,787,000
		99 Grot Blang	695,414,000	684,607,000
		100 Grot Manyang	714,274,000	703,467,000
		101 Grot Baro	711,938,000	701,131,000
		102 Jruek Bak Kreh	699,466,000	688,659,000
		103 Jruek Balee	757,773,000	746,966,000
		104 Mon Alue	691,904,000	681,097,000
		105 Lambeunot	689,722,000	678,915,000
		106 Ulee Ue	689,761,000	678,954,000
		107 Lamsiot	696,477,000	685,670,000
		108 Lingom	868,144,000	857,337,000
4	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	708,541,000	697,734,000
		110 Keunalo	710,461,000	699,654,000
		111 Lhieb	744,838,000	734,031,000
		112 Alue Gintong	741,747,000	730,940,000
		113 Seulimeum	698,442,000	687,635,000
		114 Data Gaseu	733,435,000	722,628,000
		115 Rabo	708,129,000	697,322,000
		116 Gampong Raya	687,843,000	677,036,000
		117 Lamjrueu	722,060,000	711,253,000
		118 Buga	702,677,000	691,870,000
		119 Jawie	689,179,000	678,372,000
		120 Alue Rindang	739,324,000	728,517,000
		121 Iboh Tunong	721,827,000	711,020,000
		122 Iboh Tanjong	743,402,000	732,595,000
		123 Seuneubok	697,632,000	686,825,000
		124 Meunasah Baro	720,740,000	709,933,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		125 Meunasah Tunong	741,047,000	730,240,000
		126 Batee Lhee	722,229,000	711,422,000
		127 Mangeu	737,622,000	726,815,000
		128 Bayu	755,387,000	744,580,000
		129 Ayon	765,090,000	754,283,000
		130 Lamteuba Droë	1,010,536,000	999,729,000
		131 Pulo	756,091,000	745,284,000
		132 Lampantee	785,998,000	775,191,000
		133 Lambada	939,718,000	928,911,000
		134 Blang Tingkeum	816,331,000	805,524,000
		135 Ateuk	723,437,000	712,630,000
		136 Lam Apeng	799,034,000	788,227,000
		137 Meurah	727,532,000	716,725,000
		138 Lampanah	716,405,000	705,598,000
		139 Ujong Mesjid Lampanah	731,015,000	720,208,000
		140 Ujong Keupula	798,274,000	787,467,000
		141 Leungah	777,607,000	766,800,000
		142 Beureunut	736,420,000	725,613,000
		143 Meunasah Jeumpa	698,156,000	687,349,000
		144 Pinto Khop	686,583,000	675,776,000
		145 Bak Seutui	861,243,000	850,436,000
		146 Bak Aghu	696,250,000	685,443,000
		147 Kayee Adang	706,319,000	695,512,000
		148 Lamkuk	719,916,000	709,109,000
		149 Ujong Masjid TA	723,306,000	712,499,000
		150 Lamcarak	719,645,000	708,838,000
		151 Capeng Dayah	738,209,000	727,402,000
		152 Capeng Baroh	729,304,000	718,497,000
		153 Lampisang Dayah	736,240,000	725,433,000
		154 Lampisang Tunong	763,203,000	752,396,000
		155 Lampisang Teungoh	718,515,000	707,708,000
5	Montasik	156 Mata Ie	700,825,000	690,018,000
		157 Gampong Baroh	697,915,000	687,108,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		158 Lampaseh Lhok	706,657,000	695,850,000
		159 Lampaseh Krueng	712,266,000	701,459,000
		160 Lamnga	864,397,000	853,590,000
		161 Dayah Daboh	694,004,000	683,197,000
		162 Weu Lhok	718,289,000	707,482,000
		163 Alue	688,633,000	677,826,000
		164 Weu Krueng	708,649,000	697,842,000
		165 Seubam Cot	687,794,000	676,987,000
		166 Bak Diliq	742,898,000	732,091,000
		167 Ulee Lhat	719,617,000	708,810,000
		168 Lam Raya	832,901,000	822,094,000
		169 Seubam Lhok	688,316,000	677,509,000
		170 Seumet	695,144,000	684,337,000
		171 Cot Seunong	686,924,000	676,117,000
		172 Lamme Garot	718,541,000	707,734,000
		173 Weubada	862,685,000	851,878,000
		174 Meunasah Tutong	752,749,000	741,942,000
		175 Empee Tanong	741,866,000	731,059,000
		176 Bak Ciri	693,217,000	682,410,000
		177 Warabo	692,218,000	681,411,000
		178 Teubang Phui Mesjid	717,355,000	706,548,000
		179 Teubang Phui Baro	702,365,000	691,558,000
		180 Bira Cot	730,714,000	719,907,000
		181 Bira Lhok	723,513,000	712,706,000
		182 Bung Tujoh	730,835,000	720,028,000
		183 Peurumping	726,980,000	716,173,000
		184 Atong	789,742,000	778,935,000
		185 Reudeup	736,798,000	725,991,000
		186 Mon Ara	755,307,000	744,500,000
		187 Cot Lhok	708,123,000	697,316,000
		188 Cot Lampoh Soh	696,268,000	685,461,000
		189 Bueng Raya	748,609,000	737,802,000
		190 Piyeung Lhang	702,206,000	691,399,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		191 Piyeung Manee	694,993,000	684,186,000
		192 Bueng Daroh	689,641,000	678,834,000
		193 Piyeung Datu	718,451,000	707,644,000
		194 Kuweu	702,764,000	691,957,000
6	Sukamakmur	195 Reuhat Tuha	683,020,000	672,213,000
		196 Weu Siteh	689,332,000	678,525,000
		197 Dilib Lamteungoh	696,006,000	685,199,000
		198 Baet Lampuot	699,213,000	688,406,000
		199 Dilib Bukti	682,331,000	671,524,000
		200 Seumereung	702,766,000	691,959,000
		201 Sibreh Keumudee	726,719,000	715,912,000
		202 Baet Meusago	704,200,000	693,393,000
		203 Baet Mesjid	711,692,000	700,885,000
		204 Lambaro Sibreh	679,897,000	669,090,000
		205 Lamgeu Baro	702,612,000	691,805,000
		206 Lamgeu Tuha	688,674,000	677,867,000
		207 Lampanah Ineu	708,467,000	697,660,000
		208 Tampok Jeurat Raya	687,243,000	676,436,000
		209 Tampok Blang	746,146,000	735,339,000
		210 Lamteh Dayah	693,860,000	683,053,000
		211 Lamlheu	698,888,000	688,081,000
		212 Lambarih Jurong Raya	687,325,000	676,518,000
		213 Bukloh	685,398,000	674,591,000
		214 Niron	698,469,000	687,662,000
		215 Aneuk Galong Baro	687,779,000	676,972,000
		216 Aneuk Galong Titi	676,585,000	665,778,000
		217 Blang Cut	682,360,000	671,553,000
		218 Klieng Manyang	708,858,000	698,051,000
		219 Aneuk Batee	695,330,000	684,523,000
		220 Meunasah Tuha	698,906,000	688,099,000
		221 Lampisang	711,999,000	701,192,000
		222 Meunasah Bakthu	684,973,000	674,166,000
		223 Lambarih Bak Mee	711,086,000	700,279,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		224 Luthu Dayah Krueng	715,333,000	704,526,000
		225 Luthu Lamweu	731,722,000	720,915,000
		226 Pantee Rawa	694,420,000	683,613,000
		227 Lambirah	700,810,000	690,003,000
		228 Kayee Adang	728,599,000	717,792,000
		229 Lamtanjong	698,238,000	687,431,000
7	Darul Imarah	230 Lampeuneurut Ujong Blang	703,683,000	692,876,000
		231 Lampeuneurut Gampong	694,098,000	683,291,000
		232 Lamreung	734,552,000	723,745,000
		233 Lam Cot	758,787,000	747,980,000
		234 Lamblang Trieng	712,528,000	701,721,000
		235 Lamblang Manyang	734,033,000	723,226,000
		236 Bayu	707,295,000	696,488,000
		237 Lagang	728,226,000	717,419,000
		238 Lamsiteh	703,778,000	692,971,000
		239 Lam Kawee	710,935,000	700,128,000
		240 Lheu Blang	710,174,000	699,367,000
		241 Payaroh	701,131,000	690,324,000
		242 Lamsidaya	721,482,000	710,675,000
		243 Kuta Karang	727,188,000	716,381,000
		244 Leugeu	879,526,000	868,719,000
		245 Lampeuneuen	735,712,000	724,905,000
		246 Lamtheun	721,319,000	710,512,000
		247 Denong	734,692,000	723,885,000
		248 Tingkeum	745,339,000	734,532,000
		249 Kandang	693,058,000	682,251,000
		250 Lam Bheu	755,008,000	744,201,000
		251 Daroy Kameu	692,080,000	681,273,000
		252 Geundring	697,357,000	686,550,000
		253 Garot	732,922,000	722,115,000
		254 Pasheu Beutong	720,220,000	709,413,000
		255 Lampasi Engking	755,505,000	744,698,000
		256 Jeumpet Ajun	712,759,000	701,952,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		257 Gue Gajah	786,377,000	775,570,000
		258 Leu Ue	740,076,000	729,269,000
		259 Ulee Lueng	701,664,000	690,857,000
		260 Punie	714,325,000	703,518,000
		261 Ulee Tuy	746,851,000	736,044,000
8	Peukan Bada	262 Lam Badeuek	839,762,000	828,955,000
		263 Lam Guron	697,766,000	686,959,000
		264 Lambaro Nijid	748,359,000	737,552,000
		265 Lam Pageu	710,860,000	700,053,000
		266 Gampong Baro	836,974,000	826,167,000
		267 Lam Manyang	835,389,000	824,582,000
		268 Lamteh	838,727,000	827,920,000
		269 Lam Lumpu	867,238,000	856,431,000
		270 Lam Teungoh	689,521,000	678,714,000
		271 Lam Tutui	694,302,000	683,495,000
		272 Meunasah Tuha	845,575,000	834,768,000
		273 Lam Awee	686,876,000	676,069,000
		274 Pulo Bunta	694,375,000	683,568,000
		275 Beuradeun	683,136,000	672,329,000
		276 Lampisang	700,775,000	689,968,000
		277 Keuneu Eu	728,418,000	717,611,000
		278 Lam Isek	841,943,000	831,136,000
		279 Lam Keumok	687,374,000	676,567,000
		280 Lam Rukam	685,362,000	674,555,000
		281 Gurah	848,633,000	837,826,000
		282 Rima Jeneue	703,354,000	692,547,000
		283 Lam Geue	841,091,000	830,284,000
		284 Lam Hasan	714,701,000	703,894,000
		285 Paya Tieng	690,881,000	680,074,000
		286 Ajuen	862,056,000	851,249,000
		287 Rima Keneurum	835,402,000	824,595,000
9	Mesjid Raya	288 Meunasah Kulam	765,435,000	754,628,000
		289 Beurandeh	799,476,000	788,669,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		290 le Seum	759,155,000	748,348,000
		291 Meunasah Keudee	810,649,000	799,842,000
		292 Lamreh	811,768,000	800,961,000
		293 Meunasah Mon	816,458,000	805,651,000
		294 Paya Kameng	722,015,000	711,208,000
		295 Ruyung	781,000,000	770,193,000
		296 Ladong	875,481,000	864,674,000
		297 Gampong Baro	703,997,000	693,190,000
		298 Durung	823,685,000	812,878,000
		299 Neuheun	963,070,000	952,263,000
		300 Lamnga	713,412,000	702,605,000
10	Ingin Jaya	301 Meunasah Manyang	714,700,000	703,893,000
		302 B a k o y	859,188,000	848,381,000
		303 Meunasah Baro	707,151,000	696,344,000
		304 Meunasah Dayah	694,907,000	684,100,000
		305 Meunasah Tutong	722,701,000	711,894,000
		306 Siron	724,235,000	713,428,000
		307 Pasi	725,555,000	714,748,000
		308 Dham Ceukok	707,537,000	696,730,000
		309 Dham Pulo	682,353,000	671,546,000
		310 Lubuk Sukon	694,572,000	683,765,000
		311 Lubuk Gapuy	697,901,000	687,094,000
		312 Pasi Lubok	854,673,000	843,866,000
		313 Bueng Ceukok	831,485,000	820,678,000
		314 Teubang Phui	711,758,000	700,951,000
		315 Ateuk Anggok	708,665,000	697,858,000
		316 Ajee Rayeuk	702,416,000	691,609,000
		317 Ajee Cut	686,552,000	675,745,000
		318 Gani	713,088,000	702,281,000
		319 Ateuk Lueng le	746,989,000	736,182,000
		320 Cot Alue	838,555,000	827,748,000
		321 Cot Suruy	855,127,000	844,320,000
		322 Cot Bada	697,626,000	686,819,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		323 Menasah Ajee PA	712,572,000	701,765,000
		324 Meunasah Krueng	851,048,000	840,241,000
		325 Jurong Peujeura	851,028,000	840,221,000
		326 Lubuk Batee	717,174,000	706,367,000
		327 Bineh Blang	886,495,000	875,688,000
		328 Pantee	734,123,000	723,316,000
		329 Meunasah Kalut	729,526,000	718,719,000
		330 Meunasah Manyang	714,626,000	703,819,000
		331 Meunasah Manyet	889,413,000	878,606,000
		332 Santan	689,457,000	678,650,000
		333 Tanjong	832,845,000	822,038,000
		334 Reuloh	716,120,000	705,313,000
		335 Paleuh Blang	691,030,000	680,223,000
		336 Cot Mentiwan	686,980,000	676,173,000
		337 Lampreh Lj	692,448,000	681,641,000
		338 Paleuh Pulo	702,144,000	691,337,000
		339 Lam Cot	705,135,000	694,328,000
		340 Lamsinyeu	685,523,000	674,716,000
		341 Lam Ue	830,387,000	819,580,000
		342 Cot Gud	679,525,000	668,718,000
		343 Lamdaya	690,338,000	679,531,000
		344 Lambada	691,397,000	680,590,000
		345 Lambaro	692,131,000	681,324,000
		346 Ujong XII	683,916,000	673,109,000
		347 B a d a	683,777,000	672,970,000
		348 Lamteungoh	711,908,000	701,101,000
		349 Kayee Lee	784,338,000	773,531,000
		350 Lampreh LT	698,447,000	687,640,000
11	Kuta Baro	351 Krueng Anoi	714,063,000	703,256,000
		352 Lampuuk	683,761,000	672,954,000
		353 Cot Beut	723,307,000	712,500,000
		354 Bueng Bakjok	716,791,000	705,984,000
		355 Lam Neuheun	738,152,000	727,345,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		356 Seupeu	737,954,000	727,147,000
		357 Cot Mancang	707,834,000	697,027,000
		358 Lambaet	724,026,000	713,219,000
		359 Cot Masam	699,290,000	688,483,000
		360 Gue	724,645,000	713,838,000
		361 Lam Sabang	751,801,000	740,994,000
		362 Lam Alue Raya	710,429,000	699,622,000
		363 Lam Alue Cut	762,730,000	751,923,000
		364 Leupung Mesjid	704,217,000	693,410,000
		365 Cot Lamme	741,343,000	730,536,000
		366 Leupung Ulee Alue	713,685,000	702,878,000
		367 Lampoh Tarom	735,229,000	724,422,000
		368 Lamteube Geupula	737,921,000	727,114,000
		369 Lamteube Mon Ara	709,209,000	698,402,000
		370 Aron	695,287,000	684,480,000
		371 Bak Buloh	712,189,000	701,382,000
		372 Lam Seunong	702,695,000	691,888,000
		373 Lam Raya	746,641,000	735,834,000
		374 Lam Roh	694,800,000	683,993,000
		375 Lambunot Tanoh	706,583,000	695,776,000
		376 Tumpok Lampoh	728,422,000	717,615,000
		377 Puuk	747,982,000	737,175,000
		378 Lambunot Paya	747,633,000	736,826,000
		379 Lampoh Keude	696,392,000	685,585,000
		380 Lam Asan	710,830,000	700,023,000
		381 Lambro Deyah	702,757,000	691,950,000
		382 Lambro Bileu	743,326,000	732,519,000
		383 Cot Peutano	708,623,000	697,816,000
		384 Cot Cut	726,819,000	716,012,000
		385 Meunasah Baktrieng	842,798,000	831,991,000
		386 Babah Jurong	742,044,000	731,237,000
		387 Lam Glumpang	707,781,000	696,974,000
		388 Rabeu	713,278,000	702,471,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		389 Cucum	749,400,000	738,593,000
		390 Deyah	742,707,000	731,900,000
		391 Lam Trieng	692,323,000	681,516,000
		392 Beurangong	700,209,000	689,402,000
		393 Cot Preh	735,160,000	724,353,000
		394 Cot Raya	711,584,000	700,777,000
		395 Cot Yang	725,038,000	714,231,000
		396 Ujong Blang	727,635,000	716,828,000
		397 Lamceu	711,327,000	700,520,000
12	Darussalam	398 Angan	701,044,000	690,237,000
		399 Lampeudaya	701,239,000	690,432,000
		400 Lambada Peukan	683,044,000	672,237,000
		401 Lambiheu LA	730,691,000	719,884,000
		402 Lambaro Sukun	738,386,000	727,579,000
		403 Miruek Taman	704,545,000	693,738,000
		404 Suleue	842,007,000	831,200,000
		405 Gampong Cot	712,510,000	701,703,000
		406 Gampong Blang	719,731,000	708,924,000
		407 Lampuja	830,954,000	820,147,000
		408 Tanjung Deah	708,123,000	697,316,000
		409 Limpok	707,710,000	696,903,000
		410 Lampuuk	694,819,000	684,012,000
		411 Lam Ujong	696,451,000	685,644,000
		412 Lamgawee	691,606,000	680,799,000
		413 Barabung	686,856,000	676,049,000
		414 Lamtimpeueng	688,801,000	677,994,000
		415 Tungkop	710,360,000	699,553,000
		416 Tanjung Selamat	867,445,000	856,638,000
		417 Lamkeunung	696,899,000	686,092,000
		418 Lam Duro	699,294,000	688,487,000
		419 Lamklat	686,390,000	675,583,000
		420 Lambiheu Siem	726,615,000	715,808,000
		421 Lambitra	694,827,000	684,020,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		422 Lieue	710,088,000	699,281,000
		423 Krueng Kalee	754,780,000	743,973,000
		424 Lam Asan	716,052,000	705,245,000
		425 Lamreh	861,204,000	850,397,000
		426 Siem	700,450,000	689,643,000
13	Pulo Aceh	427 Rinon	722,484,000	711,677,000
		428 Alue Raya	726,322,000	715,515,000
		429 Meulingge	753,231,000	742,424,000
		430 Lapeng	722,794,000	711,987,000
		431 Ulee Paya	734,888,000	724,081,000
		432 Gugop	787,370,000	776,563,000
		433 Seurapong	758,645,000	747,838,000
		434 Blang Situngkoh	738,039,000	727,232,000
		435 Paloh	731,913,000	721,106,000
		436 Lampuyang	796,090,000	785,283,000
		437 Lhoh	729,350,000	718,543,000
		438 Teunom	779,772,000	768,965,000
		439 Lamteng	704,109,000	693,302,000
		440 Pasi Janeng	726,522,000	715,715,000
		441 Rabo	749,412,000	738,605,000
		442 Alue Reuyeueng	715,273,000	704,466,000
		443 Deudap	700,757,000	689,950,000
14	Lembah Seulawah	444 Lamtamot	869,288,000	858,481,000
		445 Lambaro Tunong	947,659,000	936,852,000
		446 Lon Baroh	758,933,000	748,126,000
		447 Lon Asan	814,149,000	803,342,000
		448 Paya Keureleh	745,089,000	734,282,000
		449 Panca	787,921,000	777,114,000
		450 Lamkubu	739,381,000	728,574,000
		451 Panca Kubu	715,183,000	704,376,000
		452 Desa Teuladan	748,015,000	737,208,000
		453 Suka Damai	872,650,000	861,843,000
		454 Sukamulia	902,339,000	891,532,000

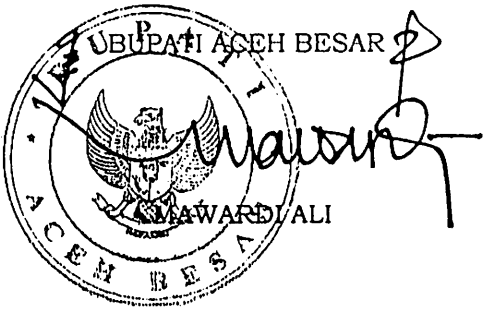
NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		455 Saree Aceh	1,130,657,000	1,119,850,000
15	Kota Jantho	456 Teureubeh	913,864,000	903,057,000
		457 Barueh	746,570,000	735,763,000
		458 Jantho	813,251,000	802,444,000
		459 Awek	775,671,000	764,864,000
		460 Data Cut	724,054,000	713,247,000
		461 Bueng	797,507,000	786,700,000
		462 Weu	769,109,000	758,302,000
		463 Jalin	829,637,000	818,830,000
		464 Suka Tani	716,873,000	706,066,000
		465 Cucum	798,396,000	787,589,000
		466 Jantho Baru	817,354,000	806,547,000
		467 Jantho Makmur	725,910,000	715,103,000
		468 Bukit Meusara	742,322,000	731,515,000
16	Kuta Cot Glie	469 Lampakuk	750,438,000	739,631,000
		470 Lampoh Raja	730,005,000	719,198,000
		471 Lam Aling	899,149,000	888,342,000
		472 Lam Leupung	751,258,000	740,451,000
		473 Lamkleng	712,741,000	701,934,000
		474 Ie Alang Lamkeremeuh	690,399,000	679,592,000
		475 Ie Alang Lamghui	701,748,000	690,941,000
		476 Ie Alang Mesjid	731,804,000	720,997,000
		477 Ie Alang Dayah	745,589,000	734,782,000
		478 Lamtui	864,504,000	853,697,000
		479 Barih Lhok	851,411,000	840,604,000
		480 Bung Simek	770,590,000	759,783,000
		481 Banda Safa	711,043,000	700,236,000
		482 Bithak	688,114,000	677,307,000
		483 Lambeugak	722,863,000	712,056,000
		484 Pakuk	882,511,000	871,704,000
		485 Lamsie	917,331,000	906,524,000
		486 Sigapang	719,117,000	708,310,000
		487 Tutui	734,905,000	724,098,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		488 Pasar Lampakuk	834,140,000	823,333,000
		489 Maheng	755,132,000	744,325,000
		490 Leupung Bruek	703,037,000	692,230,000
		491 Keumireu	705,537,000	694,730,000
		492 Lam Leuot	694,503,000	683,696,000
		493 Leupung Baleu	706,642,000	695,835,000
		494 Bak Sukon	769,824,000	759,017,000
		495 Cot Bayu	708,653,000	697,846,000
		496 Glee Jai	854,698,000	843,891,000
		497 Kereweng Blang	730,446,000	719,639,000
		498 Kereweng Krueng	711,057,000	700,250,000
		499 Siron Blang	787,371,000	776,564,000
		500 Siron Krueng	709,195,000	698,388,000
17	Kuta Malaka	501 Lambaro Samahani	688,017,000	677,210,000
		502 Lam Ara Cut	693,445,000	682,638,000
		503 Lam Ara Eungkit	687,927,000	677,120,000
		504 Lam Ara Tunong	732,204,000	721,397,000
		505 Leupung Riwat	710,721,000	699,914,000
		506 Tumbo Baro	743,890,000	733,083,000
		507 Leupung Cut	704,235,000	693,428,000
		508 Lamsiteh Cot	709,069,000	698,262,000
		509 Reuleung Karing	683,317,000	672,510,000
		510 Leubok Buni	709,104,000	698,297,000
		511 Leubok Batee	696,009,000	685,202,000
		512 Bughu	720,712,000	709,905,000
		513 Teu Dayah	740,212,000	729,405,000
		514 Leupung Rayeuk	707,074,000	696,267,000
		515 Reuleung Geulumpang	723,351,000	712,544,000
18	Simpang Tiga	516 Ateuk Lam Phang	688,812,000	678,005,000
		517 Ateuk Lampeuot	684,805,000	673,998,000
		518 Ateuk Mon Panah	685,885,000	675,078,000
		519 Ateuk Lam Ura	700,489,000	689,682,000
		520 Ateuk Cut	694,800,000	683,993,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		521 Ateuk Blang Asan	743,449,000	732,642,000
		522 Lamjamee Dayah	713,905,000	703,098,000
		523 Lambatee	709,570,000	698,763,000
		524 Nya	705,898,000	695,091,000
		525 Batee Linteung	688,077,000	677,270,000
		526 Krueng Mak	680,870,000	670,063,000
		527 Lambunot	698,551,000	687,744,000
		528 Lamjamee Lamkrak	689,873,000	679,066,000
		529 Blang Miro	687,588,000	676,781,000
		530 Blang Preh	696,243,000	685,436,000
		531 Bak Ulee Tutue	699,252,000	688,445,000
		532 Lam Urid	687,217,000	676,410,000
		533 Tantuha	685,692,000	674,885,000
19	Darul Kamal	534 Lhang	871,614,000	860,807,000
		535 Biluy	699,827,000	689,020,000
		536 Lambatee	865,199,000	854,392,000
		537 Lamkunyet	709,640,000	698,833,000
		538 Lamtadok	730,361,000	719,554,000
		539 Neusok	704,029,000	693,222,000
		540 Turam	712,564,000	701,757,000
		541 Teubaluy	695,751,000	684,944,000
		542 Blang Kiree	702,745,000	691,938,000
		543 Mane Dayah	862,707,000	851,900,000
		544 Lamsod	687,734,000	676,927,000
		545 Lam Bleut	722,236,000	711,429,000
		546 Empetring	696,830,000	686,023,000
		547 Lambaro Biluy	865,348,000	854,541,000
20	Baitussalam	548 Cadek	699,964,000	689,157,000
		549 Kajhu	864,431,000	853,624,000
		550 Baet	750,885,000	740,078,000
		551 Blang Krueng	740,374,000	729,567,000
		552 Klieng Meuria	700,211,000	689,404,000
		553 Lambada Lhok	717,492,000	706,685,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		554 Lampineung	737,346,000	726,539,000
		555 Lam Asan	736,651,000	725,844,000
		556 Labuy	703,668,000	692,861,000
		557 Lam Ujong	713,960,000	703,153,000
		558 Klieng Cot Aron	701,075,000	690,268,000
		559 Cot Paya	683,605,000	672,798,000
		560 Miruek Lamreudeup	792,484,000	781,677,000
21	Krueng Barona Jaya	561 Meunasah Papeun	878,843,000	868,036,000
		562 Meunasah Baktring	734,188,000	723,381,000
		563 Lung le	732,301,000	721,494,000
		564 Lampermei	709,742,000	698,935,000
		565 Gla Deyah	866,508,000	855,701,000
		566 Miruk	754,824,000	744,017,000
		567 Lam Gapang	800,792,000	789,985,000
		568 Meunasah Manyang	691,769,000	680,962,000
		569 Meunasah Baet	735,492,000	724,685,000
		570 Meunasah Intan	714,507,000	703,700,000
		571 Rumpet	730,068,000	719,261,000
		572 Gla Meunasah Baro	714,240,000	703,433,000
22	Leupung	573 Layeun	769,726,000	758,919,000
		574 Pulot	778,659,000	767,852,000
		575 Lamseunia	731,896,000	721,089,000
		576 Meunasah Mesjid	717,050,000	706,243,000
		577 Meunasah Bak U	706,336,000	695,529,000
		578 Dayah Mamplam	871,723,000	860,916,000
23	Blang Bintang	579 Kayee Kunyet	780,172,000	769,365,000
		580 Data Makmur	783,778,000	772,971,000
		581 Cot Hoho	684,343,000	673,536,000
		582 Cot Nambak	687,381,000	676,574,000
		583 Cot Meulangen	697,532,000	686,725,000
		584 Cot Rumpun	689,981,000	679,174,000
		585 Cot Jambo	848,876,000	838,069,000
		586 Bueng Pageu	708,181,000	697,374,000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
		587 Cot Sayun	686,472,000	675,665,000
		588 Cot Leuot	699,810,000	689,003,000
		589 Cot Bagi	912,023,000	901,216,000
		590 Empee Bata	741,675,000	730,868,000
		591 Cot Mancang	700,630,000	689,823,000
		592 Teupin Batee	704,500,000	693,693,000
		593 Gampong Blang	731,819,000	721,012,000
		594 Cot Karieng	690,996,000	680,189,000
		595 Cot Madhi	844,270,000	833,463,000
		596 Cot Malem	711,273,000	700,466,000
		597 Bung Sidom	703,395,000	692,588,000
		598 Meulayo	851,785,000	840,978,000
		599 Cot Puklat	723,832,000	713,025,000
		600 Cot Geundreut	708,866,000	698,059,000
		601 Cot Mon Raya	836,642,000	825,835,000
		602 Lam Siem	700,967,000	690,160,000
		603 Paya Ue	833,902,000	823,095,000
		604 Lamme	695,496,000	684,689,000
	JUMLAH SELURUHNYA		444,083,276,000	437,555,848,000



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH GAMPONG
KECAMATAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2													Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
a	b	c	a	b	c	d	Rp.					Rp.	Rp.	10		11	12	13	14	15	
1								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	3							SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK GAMPONG													
5	3	00						KEADAAN MENDESAK GAMPONG													
5	3	00	5	4				Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga													
5	3	00	5	4	1	01		Belanja Tak Terduga													
								1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)													
								BLT-Bulan Pertama													
								BLT Bulan ke Dst													
			6					PEMBIAYAAN													
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2			Penyertaan Modal Gampong													
			6	2	2	1		Penyertaan Modal Gampong													
								JUMLAH PEMBIAYAAN													
								JUMLAH													
								(PENDAPATAN - BELANJA- PEMBIAYAN)													

.....,2020

Keuchik

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT GAMPONG

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT GAMPONG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KELAHIRAN**

KECAMATAN : KECAMATAN :
GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 – 23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET PELAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAL 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINA KESEHATAN		
ANAK USIA 0–23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TAHUN KAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TAHUN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 – 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	5 (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG			

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Pembayaran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Aceh Besar

Dengan rimcian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut sudah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

....., Tanggal (8)

..... (9)

Stempel

Materai
Rp. 6.000,-

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS GAMPONG

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Tahap Penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi Nomor Rekening penerima dana
(6)	Diisi Nama Rekening penerima dana
(7)	Diisi Nama Bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (keuchik)
(10)	Diisi Tanda tangan (Keuchik)
(11)	Diisi Nama penanda tangan (Keuchik)

